BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.2.1 Hasil Kegiatan KKL

Selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan KKL, banyak kegiataan yang dilakukan penulis selama di BAPPEDA Kabupaten Sambas Prov. Kalimantan Barat.

Minggu Pertama

Hari pertama di Minggu pertama KKL di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Prov. Kalimantan Barat, Penulis masuk pada jam 08.00 WIBA . Penulis d tempatkan di Bidang Penelitian, Pembangunan dan Statistik . Penulis langsung keruangan, sekitar ½ jam penulis berada di ruangan , di hari pertama penulis di beri tugas pembimbing untuk ikut di ruangan rapat untuk membantu dokumentasi dan arsip rapat . Kemudian pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA, Setelah masuk penulis melanjutkan kembali s/d pukul 15.00 WIBA, setelah itu penulis mendapatkan ijin pulang, sebelum pulang penulis di kasih bingkisan untuk berbuka puasa, Pada saat itu penulis melaksanakan KKL pada bulan Ramadhan.

Hari Kedua KKL Penulis masuk seperti hari pertama pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA , penulis langsung keruangan dan penulis di beri tugas untuk mengetik. Sekitat pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah penulis masuk kembali , penulis di beri tugas melakukan pengarsipan surat-surat masuk. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIBA penulis mendapatkan ijin pulang.

Hari ketiga KKL penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan . Sekitar ½ jam penulis diruangan, penulis di beri tugas pembimbing untuk membayar

pajak disuatu BANK swasta, sekitar 1 jam lebih penulis membayar pajak, penulis kembali lagi ke kantor sampai pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah masuk kembali penulis di beri tugas untuk memasukan arsip surat-surat dari dinas. Sekitar pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Minggu Kedua

Hari pertama di minggu kedua pelaksanaan KKL, penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Seteleh penulis berada di ruangan, penulis langsung di beri tugas mengetik , sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA . setelah penulis masuk kembali , penulis kembali melanjutkan tugas mengetik . waktu udh menunjukan jam 15.00 WIBA penulis di perbolehkan pulang.

Hari kedua di minggu kedua pelaksanaan KKL, penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Setelah penulis berada diruangan, penulis di beri tugas mengetik seperti hari sebelumnya, sampai sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Dan penulis melanjutkan tugas . Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-tiga di minggu kedua pelaksanan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA.Setibanya di BAPPEDA, di hari ini penulis di beri tugas untuk mengantar surat di kantor-kantor dinas. Setibanya pukul 13.00 WIBA penulis masuk kembali dan menulis arsip surat-surat masuk dari dinas. Sampai sekitar pukul 15.00 WIBA penulis mendapat ijin pulang.

Hari ke-empat di minggu kedua pelaksanaan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Setelah berada di ruangan penulis di beri tugas mengetik seperti hari sebelumnya. Sampai sekitar pukul 12.00 WIBA

penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA . Setelah masuk kembali penulis melanjutkan tugas. Sekitar pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-lima di minggu kedua pelaksanaan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setelah masuk ruangan penulis hanya di beri tugas menulis arsip surat masuk dari dinas. Di hari ini tidak banyak pekerjaan yang dikerjakan penulis. Sekitar jam 11.30 WIBA, penulis di ijinkan istirahat di karenakan hari jum'at dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah masuk kembali penulis tidak pekerjaan yang di beri kan. Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Minggu Ketiga

Hari pertama di minggu ketiga pelaksanaan KKL, di hari ini penulis masuk lebih awal pukul 07.00 WIBA di karenakan untuk membantu persiapan rapat. Setelah berada di ruangan penulis langsung membantu mempersiapkan alat perlengkapan rapat di lantai 2, sekitar pukul 08.00 WIBA, rapat di mulai dan penulis di beri tugas membantu dokumentasi dan arsip rapat. Sekitar pukul 12.00 WIBA peserta rapat istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA, setelah masuk kembali peserta melanjutkan rapat. Sekitar pukul 15.00 WIBA rapat selesai, penulis membantu merapikan ruangan sampai pukul 16.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-dua di minggu ketiga pelaksanaan KKL, penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setelah penulis berada di ruangan, penulis di beri tugas mengetik, sampai pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA dan melanjutakan tugas. Sekitar pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-tiga di minggu ketiga pelaksanaan KKL, penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA , penulis langsung keruangan dan penulis di beri tugas untuk mengetik. Sekitar pukul 12.00 WIBA penulis

istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah penulis masuk kembali , penulis di beri tugas melakukan pengarsipan surat-surat masuk. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIBA penulis mendapatkan ijin pulang.

Hari ke-empat di minggu ketiga pelaksanaan KKL, penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Setelah penulis berada diruangan, penulis di beri tugas mengetik, sampai sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Dan penulis melanjutkan tugas . Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-lima di minggu ketiga pelaksanaan KKL, penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Setelah penulis berada diruangan, penulis di beri tugas mengetik seperti hari sebelumnya, sampai sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Dan penulis melanjutkan tugas . Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Minggu ke-empat

Hari pertama di minggu keempat pelaksanaan KKL, penulis masuk seperti biasa pukul 08.00 WIBA. Setibanya penulis di BAPPEDA, penulis langsung keruangan. Setelah penulis berada diruangan, penulis di beri tugas mengetik, sampai sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Dan penulis melanjutkan tugas . Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ke-dua di minggu keempat pelaksanaan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setelah masuk ruangan penulis hanya di beri tugas melakukan pengarsipan surat-surat masuk. Di hari ini tidak banyak pekerjaan yang dikerjakan penulis. Sekitar pukul 12.00 WIBA penulis masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah masuk kembali penulis

tidak pekerjaan yang di kerjakan. Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari ketiga di minggu keempat pelaksanaan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setelah masuk ruangan penulis hanya di beri tugas melakukan pengarsipan surat-surat masuk. Di hari ini seperti hari sebelumnya tidak banyak pekerjaan yang dikerjakan penulis. Sekitar pukul 12.00 WIBA penulis masuk kembali pukul 13.00 WIBA. Setelah masuk kembali penulis tidak pekerjaan yang di kerjakan. Sampai pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan pulang.

Hari keempat di minggu keempat pelaksanaan KKL, seperti biasa penulis masuk pukul 08.00 WIBA. Setelah masuk ruangan, penulis di beri tugas untuk mengantarkan surat ke dinas-dinas dan mengetik. Sekitar pukul 12.00 WIBA penulis istirahat dan masuk kembali pukul 13.00 WIBA, penulis melakukan pengarsipan surat-surat masuk . Pukul 15.00 WIBA penulis di ijinkan penulis.

Hari kelima atau d hari yang terakhir penulis melakukakn KKL di BAPPEDA, penulis masuk jam 08.00 WIBA. Di hari terakhir penulis hanya mengurus surat-surat dan data-data yang diperlukan untuk menulis laporan KKL di BAPPEDA dan sekaligus penulis pamitan sama pembibing dan pegawai-pegawai lainnya.

4.2.2 Pembahasan RPJMD

Berdasarkan laopran KKL kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan daerah dalam penyusuanan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2012 – 2016 , di perlukan berbagai Analisis, Isu – isu dan Strategi Daerah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal dan eksternal

Analisis ini diperlukan untuk melihat kecenderungan posisi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta meminimalisir berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan kondisi dan potensi itu diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang sistematis untuk menghasilkan suatu strategi pembangunan yang dapat dijabarkan kedalam program dan kegiatan pembangunan.

Dalam ruang lingkup analisis lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Analisis SWOT

	STRENGTH (S)	OPPORTUNITIES (O)	
STRENGTH	1. Memiliki potensi lahan pertanian, perikanan, dan kelautan yang luas. 2. Telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sehingga arah pembangunan menjadi lebih jelas. 3. Memiliki kawasan perbatasan yang sudah diresmikan 1 Januari 2011 sebagai pintu resmi (PPLB Aruk) 4. Penduduk yang relatif homogen sehingga potensial menjadi basis pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. 5. Mempunyai potensi budaya dan sejarah sebagai kesultanan. 6. Posisi geografis Kabupaten Sambas pada lintasan jalur ekonomi Utara Kalimantan Barat.	1. Perkembangan ekonomi di negara bagian Sarawak Malaysia yang berbatasan dan memiliki pintu resmi dengan Kabupaten Sambas. 2. Kebijakan Pemerintah Provinsi yang menempatkan Kabupaten Sambas sebagai kawasan prioritas pembangunan pertanian dan kelautan di Kalimantan Barat. 3. Pasar bebas, kuatnya permintaan terhadap produk *home industry* membuka peluang pasar bagi produk-produk unggulan Kabupaten Sambas. 4. Perkembangan pembangunan Migas di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang secara geografis sangat dekat dengan Kabupaten Sambas. 5. Perkembangan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Natuna serta Kabupaten tetangga (Singkawang dan Bengkayang) membuka peluang untuk pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Sambas. 6. Globalisasi menyebabkan cepatnya arus informasi maupun transformasi.	OPPORTUNITIES

	WEAKNESS (W)	THREATH (T)
WEAKNESS	1 Terbatasnya infrastruktur (prasarana dan sarana dasar) sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. 2 Kualitas SDM yang masih rendah berdampak pada terbatasnya produktifitas serta profesionalisme kerja masyarakat dan aparatur. Derajat pendidikan, kesehatan, ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sambas masih rendah. 3 PAD rendah, kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal serta kurangnya kebijakan insentif bagi investor berdampak pada keterbatasan dana bagi pembangunan. 4 Belum selesainya batas-batas wilayah dan kejelasan status aset Kabupaten menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang berdampak pada belum optimumnya pelayanan pemerintah daerah. 5 Belum lengkapnya perangkat peraturan daerah sebagai dasar operasional bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sambas.	1. Investor cenderung ke daerah maju yang lebih siap menangkap peluang investasi. 2. Pengaruh budaya negatif dari luar (narkoba, sex bebas, dll.) yang menurunkan kualitas SDM Kabupaten Sambas. 3. Era pasar bebas menyebabkan persaingan yang ketat sehingga dapat mengancam produk-produk lokal yang umumnya masih memiliki daya saing yang rendah. 4. Banyaknya komoditas pertanian maupun produk UKM/IKM sejenis yang dihasilkan daerah lain menyebabkan persaingan yang ketat. 5. Masih besarnya tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat;.

B. Isu Strategi Daerah

Dengan memperhatikan analisa lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis daerah** Kabupaten Sambas dalam lima tahun (2012-2016) mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Minimnya ketersediaan infrastruktur dasar, terutama di kawasan perbatasan.
b. Lambannya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang ditandai oleh tingginya proporsi desa tertinggal.

c. Belum optimalnya pemanfaatan/pengolahan hasil produksi komoditas pertanian (jeruk, padi, karet, kelapa sawit, dan lada) serta perikanan dan kelautan dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal.
d. Belum optimalnya sistem distribusi dan koneksi hasil produksi pertanian, perikanan dan kelautan akibat terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik, dan investasi.
e. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
f. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi.
g. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran.
h. Rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akibat terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidikan dan kesehatan.
i. Rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam kehidupan berdemokrasi maupun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
j. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan dalam pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
k. Meningkatnya frekuensi tindak kriminal, penderita HIV AIDS, narkoba, kenakalan remaja (dekadensi moral) yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia (generasi penerus) di masa yang akan datang.

l. Belum sinergisnya antara pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya dengan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.
m. Rendahnya peran dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di daerah.

C. Strategi Daerah

Sesuai dengan analisis lingkungan internal dan eksternal serta dengan memperhatikan isu strategis daerah di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Sambas akan ditempuh **Strategi Pembangunan Daerah**, sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan Infrastruktur untuk mendorong peningkatan perekonomian rakyat berbasis komoditas unggulan khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
2. Peningkatan daya dukung wilayah dengan membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana daerah untuk mengembangkan kawasan perbatasan serta wilayah strategis dan cepat tumbuh lainnya, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan.
3. Peningkatan perekonomian masyarakat dan iklim investasi daerah yang berorientasi pasar, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan serta pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

4. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan berdasarkan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan, KB dan anak untuk menunjang program-program unggulan daerah.
6. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif.
8. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi.
10. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.
11. Peningkatan kualitas pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan budaya untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Serta Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kemampuan pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas sangat menentukan bagi proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan. Pemerintah Kabupaten Sambas tidak akan mampu melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kepada masyarakat tanpa didukung kemampuan keuangan yang memadai.

Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengelolaan keuangan/ anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat akan keuangan daerah yang dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kemampuan keuangan dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kemampuan keuangan Kabupaten Sambas selama tahun 2000-2004 terus meningkat, dengan didukung oleh penerimaan keuangan terutama yang bersumber dari dana pertimbangan dan pendapatan asli daerah. Kemampuan APBD yang terus meningkat demikian digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pemerintah khususnya untuk pembiayaan *public service*.

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan pedoman di atas, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban.

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah diorientasikan pada terciptanya hasil pengelolaan yang jelas dan sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, dan tidak menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan. Perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengmbilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan

penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam implementasinya, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dengan demikian, tampak jelas adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan terciptanya mekanisme *check and balances* serta untuk mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pada tahap pertanggungjawaban keuangan daerah diawali dengan pencatatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Disamping itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah, berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan/dilaporkan kepada DPRD, setelah laporan terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan arah kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

Selanjutnya, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Struktur APBD

yang disusun terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sambas meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari berbagai jenis pendapatan meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana peningkatan sarana/prasarana, bantuan keuangan pemerintah provinsi, dan bagi hasil sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan daerah Kabupaten Sambas periode tahun 2006-2010 meningkat rata-rata sebesar 12,65% per tahun. Peningkatan pendapatan daerah tertinggi terjadi tahun 2007 yakni sebesar 19,52%, dan terendah pada tahun 2010 yakni sebesar 7,97%. Dilihat dari struktur pendapatan daerah, tampak bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi tertinggi, yakni rata-rata 88,74% per tahun. Kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rata-rata 7,85% per tahun, dan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 3,42% per tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan daerah. Sumber keuangan yang strategis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dilakukan tanpa menciptakan ekonomi biaya tinggi, menghindari terjadinya tumpang tindih pemungutan, dan mempertimbangkan beban yang dipikul masyarakat.

Peningkatan PAD berimplikasi langsung dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karenanya, pengelolaan PAD di Kabupaten Sambas selama tahun 2006-2010 diupayakan pada intensifikasi PAD dari berbagai objek pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pula meningkatkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD di Kab. Sambas antara lain adalah pendataan objek dan subjek pajak serta sosialisasi dan penyuluhan pajak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak. Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antar dinas/instansi pemungut.

Peluang peningkatan PAD dimungkinkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan adanya penambahan objek pajak baru sehingga optimalisasi penerimaan daerah diupayakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam membayar pajak maupun retribusi.

Secara kuantitas, realisasi PAD Kab. Sambas terus mengalami peningkatan selama tahun 2006-2010. Akan tetapi peningkatannya dari tahun ke tahun cenderung menurun. Prestasi peningkatan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2007, yakni sebesar 86,58%. Pada tahun 2008,

peningkatannya sebesar 27,17%, kemudian tahun 2009 sebesar 8,92%. Terakhir, pada tahun 2010 peningkatan PAD menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya sebesar 3,74% atau senilai Rp 0,944 Milyar.

Mengingat rendahnya kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) selama ini, maka tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang antara lain adalah perlunya pengembangan kegiatan ekonomi daerah, pembenahan administrasi dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD pada umumnya.Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sambas selama ini mengandalkan pada pungutan pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C, dan pajak reklame.

Sementara penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir belum memberikan kontribusi yang memadai. Namun dengan penambahan objek pajak kabupaten menjadi 11 jenis pajak (ekstensifikasi reguler melalui UU No. 28 Tahun 2009) maka pajak daerah masih memungkinkan untuk dioptimalkan penerimaannya.

Mencermati peluang peningkatan perpajakan daerah saat ini, intensifikasi PAD Kabupaten Sambas dalam lima tahun mendatang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, pembenahan dan peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan, dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pelayanan publik, memberikan kemudahan perijinan usaha, dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah.

2. Belanja Daerah

Dalam kepentingan yang lebih strategis, penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Alokasi belanja daerah semaksimal

mungkin diupayakan keberpihakan kepada pemberdayaan potensi ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karenanya, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sambas didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, efisiensi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas.

Belanja daerah diarahkan/difokuskan pada pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah secara bertahap mulai dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja diklasifikasikan menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pengelolaan belanja yang utama adalah mengedepankan alokasi belanja yang ideal antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Belanja tidak langsung diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu. Belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas ingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kependidikan dan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, serta mengiatan pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

Seiring dengan tuntutan pembangunan, belanja daerah Kabupaten Sambas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2006-2010, belanja daerah meningkat rata-rata sebesar 12,50% per tahun. Peningkatan cukup besar pada belanja daerah terjadi pada tahun 2008, dari Rp 520,23 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 619,89 Milyar pada tahun 2008 atau meningkat 19,16%. Komponen yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan belanja pada tahun 2008 adalah belanja pegawai.

Selanjutnya, pada tahun 2010 volume belanja daerah meningkat 9,36% dibandingkan tahun 2009. Sebagaimana kondisi sebelumnya, peningkatan belanja disebabkan kenaikan yang cukup tinggi pada belanja pegawai dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

Tabel 4.2.2
Belanja Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)

Komponen	2006	2007	2008	2009	2010
I**.Belanja tidak langsung**	257.817	244.541	302.077	341.065	422.894
1.Belanja Pegawai	220.977	209.907	265.390	305.275	377.762
2.Belanja Bunga	0.000	0.000	0.000	0.404	1.272
3.Belanja Subsidi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.Belanja Hibah	0.000	0.000	2.019	3,638	7.057
5.Belanja Bantuan Sosial	0.000	11.909	10.143	7.371	10.225
6.Belanja Bagi Hasil	0.000	0.464	0.581	0.581	0.581
7.Belanja Bantuan Keu	35.990	21.999	23.543	23.262	25.357
8.Belanja Tidak terduga	0.850	0.460	0.401	0.535	0.610
II**.Belanja Tidak Langsung**	191.553	275.691	317.810	326.613	307.263
1.Belanja Pegawai	12.409	21.741	24,921	22.877	24.923
2.Belanja Barang dan jasa	92.430	142.253	170.890	159.268	132.466
3.Belanja Modal	86.714	111.696	121.999	144.469	149.874
Jumlah Belanja (I+II)	449.370	520.232	619.888	667.678	730.157

Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sambas, 2006-2010.

Meningkatnya alokasi belanja tidak langsung menjadikan penurunan cukup tajam pada belanja langsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Puncaknya terjadi pada tahun 2009 dan 2010, ketika proporsi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung

Harapan masyarakat akan adanya perbaikan sosial ekonomi menjadikan alokasi belanja langsung secara progresif mutlak dilakukan, terutama untuk penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan daerah sebagaimana ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan daerah dan Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dibutuhkan untuk mengatasi kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan/ketidaksesuaian antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Artinya, ketika tejadi defisit/suplus anggaran daerah, maka pengelolaan pembiayaan menjadi strategis.

Oleh karenanya, kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah diprioritaskan untuk menutupi defisit/surplus anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak dan merupakan prioritas dan strategi untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Defisit anggaran yang relatif cukup tinggi di Kab. Sambas terjadi pada tahun 2008 yakni minus Rp 42,286 Milyar. Besaran defisit tersebut ditanggulangi melalui penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 60,495 Milyar; dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp 0,318 Milyar.

Tabel 4.2.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)

Komponen	2006	2007	2008	2009	2010
1.Pendapatan Daerah	441.177	527.299	577.602	667.024	720.195
2.Belanja Daerah	449.370	520.232	619.888	667.678	730.157
Surplus/Defisit	-8.193	7.067	-42.286	-0.654	-9.963
3.**Pembiayaan Daerah**					
a.Penerimaan Pembiayaan	10.693	56.178	60.813	39.660	59.185
b.Pengeluaran Pembiayaan	2.500	2.750	1.451	0.000	23.949
Pembiayaan Netto	8.193	53.428	59.362	39.660	35.236

Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sambas, 2006-2010.

Pada tahun-tahun berikutnya defisit anggaran cenderung menurun. Sumber penerimaan pembiayaan dari SILPA juga cenderung berkurang. Pada tahun 2010, penerimaan pembiayaan dari SILPA mencapai Rp Rp 39,005 Milyar. Untuk tahun-tahun mendatang diprediksi defisit anggaran semakin ditekan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan perencanaan belanja daerah secara lebih matang, sehingga tingkat realisasinya tinggi dan SILPA menjadi rendah.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sambas lima tahun yang akan datang. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan peningkatan pada sumber pendapatan yang baru.

Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah periode sebelumnya, prediksi pendapatan daerah Kabupaten Sambas tahun 2012 sampai tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 4.2.4

Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 2012-2016 (Milyar Rp)

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
1. PAD	32.072	35.702	39.922	44.161	49.047
2. Dana Perimbangan	685.861	724.480	796.928	844.239	889.638
3. Lain-lain Pendapatan Daerah	98.257	105.135	110.392	121.431	127.502
Jumlah Pendapatan Daerah	**816.190**	**865.316**	**947.241**	**1,009.831**	**1,066.187**

Sumber: Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2012-2016

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaanya? Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD jugs harus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan asset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan, dan perawatan. Perlu ada unit pengelola kekayaan daerah yang professional agar tidak terjadi *overlappin*g tugas dan kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah. Pengamanan terhadap kekayaan aderah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui siste akutansi (system pengendalian intern).

Sebagaimana kondisi beberapa tahun sebelumnya, pada kurun tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Sambas masih tetap mengandalkan sumber pendanaan dari transfer pusat, dengan tetap mengupayakan peningkatan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari PAD maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan seoptimal mungkin dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kemungkinan defisit anggaran yang terlalu besar.

4.2.2 Faktor – faktor penghambat pendukung perencanaan penyusunan dalam rangka pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten sambas.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintahan menerima sukses atau mengalami kegagalan dari pelaksanaan misinya. Secara umum suksesnya organisasi pemerintahan dalam melaksanakan misi sangat ditentukan oleh; pertama, kemampuannya memanfaatkan kekuatan serta mengoptimalkan peluang; dan kedua, kemampuannya mengantisipasi kelemahan serta mengatasi ancaman.

A. Faktor – faktor penghambat

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintahan menerima sukses atau mengalami kegagalan dari pelaksanaan misinya. Secara umum suksesnya organisasi pemerintahan dalam melaksanakan misi sangat ditentukan oleh; pertama, kemampuannya memanfaatkan kekuatan serta mengoptimalkan peluang; dan kedua, kemampuannya mengantisipasi kelemahan serta mengatasi ancaman.

Kurang telitinya pengawasan yang dilakukan. Dalam hal ini Badan Perencanan Pembangunan Daerah kurang memperhatikan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur. Karena dengan kurang telitinya suatu pengawasan, maka sekecil apapun kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para aparatur akan menjadi terabaikan dan dapat mempengaruhi disiplin kerja para aparatur.

Adapun yang merupakan penghambat pembangunan daerah adalah:

1. Tigginya angka kemisinan dan pengangguran;
2. Rendahnya kualitas SDM dilihat dari besaran IPM;
3. Rendahnya kemampuan keuangan daerah;
4. Lemahnya koordinasi baik antar sector manapun antar wilayah;
5. Kurangnya profesionalsme dan proporsi aparatur pemerinta daerah;
6. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik yang belum memadai;
7. Kondisi beberapa kawasan yang belum kondusif untuk investasi terutama dilihat dari ketersediaan nfrastruktur dasar;
8. Belum diterapkannya e-government;
9. Adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan;

B. Faktor – Faktor Pendukung

Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal terdapat beberapa hal yang merupakan unsure pendukng pembangunan Kabupate Sambas yaitu:

1. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relative banyak dan homogen;
2. Terjalinnya hubungan yang sinergis antara ulama dan umaro;
3. Memiliki summer daya alam yang potensial (lahan pertanian, pariwisata, perkebunan, dan kelauta;
4. Memiliki struktur organisasi yang sudah berorientasi pada urusan waji yang dimilikinya;
5. Adanya komitmen peemrintah daerahuntuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat;

Ada tiga hal mendasar yang menjadi kata kunci keberhasilan perencanaan RPJM, yaitu: pertama *sharing of power* (pembagian kewenangan), kedua *distrution of income* (pemeratan pendapatan),

dan ketiga *empowering* (pemberdayaan dan partisipasi). Pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai motor penggerak utama harus diubah akrena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola pembangunan yang menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

4.2.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2016. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat pencapaian sasaran misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2016.

A. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Pernyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Adapun kebijakan - kebijakan umum pemerintah untuk menunjang pembangunan yang efesien, efektif dan berhasil sebagai berikut :

1. Pembangun Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pembangunan dan perubahan yang dilakuakan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Kebijakan umum peningkatan infrastruktur dasar diwujudkan melalui sbb;

a. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu, efektif dan efisien.
b. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan
c. Mengembangkan hunian yang layak dengan sarana dan prasarana dasar yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau

2. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kebijakan Umum pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Sambas diarahkan pada :

1. *Meningkatkan/Mengembangkan Fungsi Kawasan*
   - ✓ Mendorong pertumbuhan kawasan potensial menjadi kawasan strategis.
   - ✓ Meningkatkan daya dukung fungsi kawasan sebagai pendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

2. *Mengembangkan Kebijakan Pengelolaan Kawasan.*
   - ✓ Mengembangkan kebijakan pengelolaan kawasan strategis.
   - ✓ Mengembangkan penataan ruang kawasan strategis.

3. Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kebijakan umum pengelolaan sumber daya pertanian melalui pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang menyangkut aspek dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Pendekatan kebijakan tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan sumber daya pertanian secara ekonomi layak/menguntungkan, secara ekologi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan (degradasi sumberdaya), dan secara sosial berkeadilan. Pembangunan pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

pertanian dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengganggguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan umum peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang menyangkut aspek sosial dan ekologi. Pendekatan kebijakan tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang secara ekologi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Kebijakan umum peningkatan ekonomi kerakyatan dan investasi diwujudkan melalui :

a. Peningkatan kelembagaan, organisasi, manajemen, dan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
b. Penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan UMKM.
c. Pengembangan kemampuan kewirausahaan UMKM.
d. Pengembangan industri kecil dan menengah serta industri rumah tangga.
e. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk melalui teknologi tepat guna, manajemen dan kewirausahaan.
f. Pemberdayaan dan perlindungan konsumen.
g. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
h. Perluasan dan penyebaran informasi perdagangan/bisnis.
i. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
j. Peningkatan kapasitas Ipteks sistem produksi di pedesaan.
k. Perbaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.
l. Peningkatan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana investasi.
m. Pengembangan promosi investasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.

6. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan umum meningkatkan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mempertahankan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah disertai pemerataan persebarannya.
b. meningkatkan kualitas dan produktvitas penduduk usia kerja.
c. menciptakan dan perluasan lapangan kerja baru.
d. peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin.

7. Pengembangan Kesehatan

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berprestasi di bidang pengembangan kesehatan diarahkan pada beberapa kebijakan umum sebagai berikut :

a. menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu
b. menurunkan balita berstatus gizi buruk.
c. meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan.
d. meningkatkan layanan ketersediaan alat kontrasepsi.

8. Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Anak

Kebijakan umum yang dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berprestasi di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan Anak , yaitu :

a. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Peningkatan .kualitas hidup perempuan dan anak.

c. Peningkatan pembinaan ketenagakerjaan bagi ibu rumah tangga, calon tenaga kerja perempuan.
d. Peningkatan dan pelayanan pada akseptor KB berbasis gender.
e. Penyuluhan Keluarga Berencana paradigma baru.

9. Pengembangan Pendidikan

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berprestasi di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kebijakan umum sebagai berikut :

a. Ketersediaan Layanan Pendidikan.
b. Keterjangkauan Layanan Pendidikan.
c. Peningkatan Kualitas dan Relevansi Layanan Pendidikan.
d. Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan.
e. Kepastiaan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan.

10. Pengembangan Kualitas Pemuda dan Olahraga

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berprestasi di bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada kebijakan umum sebagai berikut :

a. meningkatkan partisipasi pemuda pelopor pembangunan desa.
b. melakukan pembinaan berkelanjutan bagi pemuda berprestasi di bidang olahraga.
c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatih olahraga.
d. mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

11. Pengembangan Budaya dan Pariwisata

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berprestasi di bidang pengembangan budaya dan pariwisata diarahkan pada beberapa kebijakan umum sebagai berikut:

a. Mengembangkan nilai-nilai budaya daerah.

b. Mengembangkan pengelolaan kekayaan dan keberagamanan budaya daerah.
c. Mengembangkan dan menata potensi wisata daerah.
d. Pengembangan pemasaran dan tujuan pariwisata.
e. Mengembangkan kemitraan pembangunan pariwisata daerah.

12. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Madani di bidang peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada beberapa kebijakan umum sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
c. Meningkatkan kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
d. Menata kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kerjasama antar daerah.
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan

13. Peningkatan Perencanaan Pembangunan dan Demokrasi

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Madani di bidang peningkatan perencanaan pembangunan dan demokrasi diarahkan pada beberapa kebijakan umum, yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di daerah.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sinergisitas dalam pembangunan.
c. Mengembangkan budaya politik yang toleran.

14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Madani di bidang keuangan daerah difokuskan pada kebijakan umum sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan sumber-sumber potensial pendapatan daerah.
b. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.
c. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
d. Peningkatan kemampuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

15. Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Madani di bidang peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui kebijakan umum, yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan penataan regulasi di daerah.
b. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum di daerah.

16. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Sejahtera di bidang peningkatan keamanan dan ketertiban dilaksanakan melalui beberapa kebijakan umum, yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pemeliharaan kantrantibmas.
c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
e. Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat.
f. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum di daerah.

17. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Upaya mewujudkan Kabupaten Sambas yang Sejahtera di bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui beberapa kebijakan umum, yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
b. Meningkatkan kesadaran moral dan etika dalam masyarakat dan keluarga.
c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
d. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
e. Meningkatkan Penelitian dan pengembangan agama.

B. Tahapan Prioritas Program Pembangunan Tahun 2012-2016

Adapun tahapan prioritas program pembangunan di Kabupaten Sambas untuk 5 (lima) tahun ke depan (2012-2016) adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Program Pembangunan tahun 2012

Prioritas program pembangunan Tahun 2012 diarahkan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui :

a. Peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi kerakyatan dan investasi;
b. Reformasi birokrasi (Tata Kelola Pemerintahan) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyediaan dan perbaikan infratruktur dasar untuk memberikan implikasi yang sangat luas terhadap sector pendidikan, kesehatan, serta dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi , sektor sosial lainnya dan pada akhirnya dapat mendongkrak peningkatan IPM Kabupaten Sambas.

Fokus program prioritas tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi Sambas Mandiri, Berprestasi dan Madani.

2. Prioritas Program Pembangunan tahun 2013

Pada prinsipnya prioritas program pembangunan pada tahun 2013 masih melanjutkan prioritas program pembangunan tahun 2012, yaitu tetap mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi, reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan), serta peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Membaiknya tingkat perekonomian masyarakat pada tahun-tahun awal pelaksanaan RPJMD (Tahun 2012) diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Fokus program prioritas tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas untuk mewujudkan Sambas Mandiri, Berprestasi dan Madani.

3. Prioritas Program Pembangunan tahun 2014

Pada tahun 2014 program prioritas pembangunan masih secara konsisten diarahkan pada peningkatan IPM melalui peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Perbaikan derajat ekonomi masyarakat yang berlangsung selama dua tahun sebelumnya akan semakin efektif meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan yang berkualitas pada pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

Disisi lain bahwa reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan

beragama melalui pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Fokus program prioritas tersebut untuk mewujudkan Sambas Mandiri, Berprestasi, Madani dan Sejahtera.

4. Prioritas Program Pembangunan tahun 2015

Demikian pula untuk tahun 2015, program prioritas masih konsisten diarahkan dalam rangka meningkatkan IPM, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan kesehatan dan KB, pengembangan pendidikan, reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan), peningkatan kualitas kehidupan beragama. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, serta ditunjang oleh peningkatan pelayanan sektor publik oleh pemerintah, maka diharapkan akan dapat mengoptimalkan akses masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, KB dan anak serta semakin meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan beragama.

Fokus program prioritas pembangunan tersebut adalah untuk mempercepat visi Sambas Berprestasi dan Sejahtera.

5. Prioritas Program Pembangunan tahun 2016

Adapun prioritas program pembangunan pada tahun 2016 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas periode 2012-2016 adalah peningkatan tata kelola pemerintahan (reformasi birokrasi), peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan tetap memperhatikan program-program penunjang peningkatan IPM.

Penilaian terhadap peningkatan kemampuan/kapasitas otonomi daerah tercermin pada percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan kemampuan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan SDM aparatur, perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, peningkatan jasa

publik (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta didukung oleh semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, guna menjamin rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Fokus program prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan Sambas Madani dan Sejahtera.

4.2.4 Review RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2016

Dalam laporan KKL ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5(Lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan *Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Renstra SKPD), *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Renja SKPD) dan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah* (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, RPJMD adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahunan.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan untuk Kabupaten Sambas, maka isu-isu strategis yang diajukan antara lain: isu peningkatan SDM melalui program kesempatan kerja bagi generasi muda dan usia tua yang masih produktif, Pengembangan Pertanian yang Berkelanjutan,

Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan, isu Kondisi Lingkungan Hidup dan Upaya Pengamanan Wilayah.

Berdasarkan Laporan KKl mereview RPJM Daerah Kabupaten Sambas disusun untuk lebih melengkapi RPJMD yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaan penyusunan yang dilakukan presentasi awal mengenai penafsiran kerja dan diskusi bersama SKPD untuk mendapatkan masukan-masukan penyempurnaan. Masukan yang diharapkan adalah selain program-program pembangunan yang direncanakan juga indikator-indikator capaian yang diharapkan dari program tersebut. Kemudian observasi dan kepengumpulan data primer dan sekunder di beberapa desa untuk memahami kondisi Kabupaten Sambas secara lebih komprehensif. Selanjutnya dilakukan analisis data yang diperoleh di lapangan baik data sekunder maupun primer di studio.

Pada tahap kedua dilakukan presentasi dan diskusi untuk mendapatkan masukan dari pihak SKPD Kabupaten sambas dan jajaran terkait lainnya mengenai penyusunan review RPJM-D dan program-program pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan sekaligus indikator dan capaian dari program tersebut. Penyampaian materi pembahasan mengenai teknik perencanaan program dengan visi dan misi (sesuai dengan UU SPPN diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada aparat pemerintah dalam hal ini SKPD untuk selain merencanakan program yang sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih juga perlunya dilakukan sosialisasi dan familiarisasi program kepada masyarakat.

Disamping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam

Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sambas.

Berdasarkan Laporan KKL adapun maksud dan tujuan dari RPJMD Kabupaten Sambas tahu 2012 – 2016 sebagai berikut ;

1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sambas dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sambas.

RPJMD Kabupaten Sambas juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sambas secara berjenjang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sambas, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya;

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.